

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PADA TAHAP TANGGAP DARURAT DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Anita Dwi, Dr. Tri Yulianti, M.Si, Drs. Adi Susiantoro, M.Si
Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
anitadewi040501@gmail.com

Abstract

Disaster management is one of the government's efforts to protect the community from disaster hazards. Emergency Response is an activity carried out in the event of a disaster to reduce the adverse effects caused. Floods are one of the disasters that often occur in Sidoarjo Regency which must be addressed immediately in order to create public safety and comfort. One of the institutions that will be used as research on the implementation of this policy is the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sidoarjo Regency. This study aims to determine the implementation of disaster management policies at the emergency response stage and to describe the factors that influence policy implementation according to Edward III's theory. The informants used in this study were 8 people, namely the field head and 3 staff, namely the Tanggulangin Camat, the Village Head and the Banjarasri Community. The technique used in data collection is through interviews. The results of the study indicate that the implementation of the policy of the Regional Disaster Management Agency of Sidoarjo Regency has been running well. The factors that become obstacles in implementing the policy are limited resources and budget, as well as the lack of supporting facilities in the implementation of disaster management so that implementation activities cannot run optimally.

Keywords: Policy Implementation, Disaster Management, Emergency Response

Abstrak

Penanggulangan bencana adalah usaha pemerintah untuk dalam menjaga masyarakat dari bencana. Tanggap Darurat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan saat bencana terjadi agar bisa menyusutkan efek buruk yang ditimbulkan. Banjir merupakan bencana yang sering terjadi pada Kabupaten Sidoarjo sehingga harus segera di atasi demi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu lembaga yang akan dijadikan penelitian tentang implementasi kebijakan yakni BPBD Sidoarjo dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Tahap Tanggap Darurat serta memaparkan hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori Edward III . Ada 8 informan yang di ambil dalam penelitian ini yakni kepala bidang dan 3 kepegawaian, Camat Tanggulangin, Kepala Desa dan Masyarakat banjarasri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian membuktikan dalam mengimplementasi kebijakan BPBD Sidoarjo berjalan dengan baik. Adapun faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan

keterbatasan sumberdaya dan anggaran, serta kurangnya fasilitas penunjang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sehingga kegiatan pelaksanaan tidak bisa berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Tanggap Darurat

Pendahuluan

Bencana merupakan fenomena atau peristiwa rusaknya alam atau lingkungan tempat tinggal yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup yakni manusia, hewan maupun tumbuhan yang terjadi secara alamiah seperti banjir, tsunami, longsor, gempa dan lain sebagainya maupun bencana yang terjadi secara nonalamiah yang disebabkan oleh ulah tangan manusia yakni seperti kegagalan teknologi, adanya wabah penyakit, pembuangan sampah sembarangan yang mengakibatkan selokan menjadi tersumbat dan lain-lain. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang didalamnya memuat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa badan yang menjadi pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bertugas menanggulangi bencana lingkup nasional, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas menanggulangi bencana yang terjadi pada Daerah. (Presiden RI, 2007)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yakni lembaga pemerintahan yang didirikan pada tanggal 13 Desember 2011 dan mengacu pada UU No.24 Tahun 2007 Mengenai Penanggulangan Bencana didasarkan pada hukum pendirian SKPD Perda Kabupaten Sidoarjo No.12 Tahun 2013 tentang mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mempunyai Visi, Misi dalam meminimalisir dan menangani bencana yang terjadi khususnya di Kabupaten Sidoarjo seperti angin kencang, banjir, tanah longsor, kebakaran, tsunami, dan lain sebagainya diharapkan memberikan solusi dan perhatian bagi masyarakat dalam mengatasi dan meminimalisir bencana menggunakan strategi secara cepat dan tepat. Adapun implementasi kebijakan penanggulangan bencana BPBD Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi; Bidang Pencegahan, Kedaruratan & Logistik, Bidang Pemadam Kebakaran, dan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi.

Posisi Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Jawa Timur khususnya Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dilihat dari letak geografisnya yang termasuk dalam kategori tiga desa (desa kedungbanteng, banjarpanji, dan banjarasri) yang menjadi langganan banjir dikecamatan tanggulangin. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya bencana banjir adalah letaknya yang berdekatan dengan lokasi lumpur lapindo yang mengakibatkan terjadinya penurunan struktur tanah, kurangnya saluran untuk resapan air, kurangnya perlengkapan penanggulangan (pompa air dll). serta adanya musim hujan yang tak henti yang mengakibatkan air tergenang lebih lama dan bahkan meluap. Oleh karenanya, Pemerintah membuat suatu lembaga yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menangani bencana.

Akan tetapi dalam prakteknya implementasi kebijakan penanggulangan bencana BPBD Sidoarjo tidak sepenuhnya berjalan secara optimal khususnya di bidang tanggap darurat dikarenakan adanya beberapa hambatan diantaranya kurangnya ketersediaan anggaran (terbatas) serta sumber daya manusia yang terbatas khususnya di Bidang tanggap darurat, kurangnya fasilitas yang memadai pada saat bencana

terjadi sebagai alat penunjang saat bencana terjadi seperti pompa air, pelampung ban dan lain sebagainya membuat pelaksanaan penanggulangan bencana menjadi terhambat. Dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Juga Membuat kebijakan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat bencana terjadi yaitu dibuatnya standar operasional prosedur (SOP) Penanggulangan bencana sebagai prosedur kebijakan agar pekerjaan bisa terarah, mudah, dan tertib, sehingga dapat berjalan dengan maksimal.

Namun implementasi kebijakan penanggulangan bencana terutama pada tanggap darurat bencana di Sidoarjo sebenarnya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Banjir dan angin kencang merupakan bencana yang sering terjadi di Sidoarjo dan kurang maksimal untuk penanggulangannya khususnya tanggap darurat. Terkait dengan belum maksimalnya tahap tanggap darurat bencana pada penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Sidoarjo yang berdasarkan pada Peraturan Daerah dan Kebijakan tentang Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat, hal ini dapat dibuktikan pada proses tanggap darurat banjir di desa banjarasri kecamatan tanggulgin pada 02 Februari 2020 dalam menangani banjir yang berlangsung selama 1 bulan lebih air tak kunjung surut. Adapun penyebab banjir pada tahun 2020 tersebut diantaranya adanya hujan yang tak henti-henti, adanya pengurukan tanah, kurangnya lahan untuk resapan air, kurangnya jumlah pompa yang beroperasi, progress pembangunan lengsekan belum selesai, pembangunan kisdam belum dilakukan dan lain sebagainya.

Hal demikianlah yang membuat banjir terjadi dalam jangka waktu lama maka hal ini sulit ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan alasan keterbatasan tenaga pegawai atau relawan, anggaran yang terbatas yang membuat kebutuhan masyarakat tidak secara penuh dapat terpenuhi serta kurangnya fasilitas penunjang yang disediakan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah seperti pompa untuk menyedot air dan lain sebagainya sebagainya sebagai sarana penunjang dalam menangani bencana banjir Pada Saat Bencana tersebut terjadi. Sehingga beberapa masyarakat banjar asri terpaksa mengungsi untuk berantisipasi akan terjadinya banjir yang berskala lebih besar. Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis ingin membuat penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Pada Tahap Tanggap Darurat Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo”

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan alasan data yang didapatkan berupa hasil tulisan-tulisan, hasil dari wawancara dan lain-lain sebagainya. Dalam fokus penelitian yang di dapatkan dari BPBD Sidoarjo di Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulgin Kabupaten Sidoarjo penulis memfokuskan penelitiannya pada bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana yang terlaksana dan hambatan apa yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana banjir di BPBD Sidoarjo. maka peneliti memfokuskan penelitiannya menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward Edward III yang berpendapat bahwa terdapat empat variabel diantaranya struktur organisasi, komunikasi, disposisi dan sumber daya. Hal tersebut yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan BPBD di Bidang Tanggap Darurat pada Desa Banjarasri

a) Aspek Struktur Organisasi

Adanya struktur organisasi yang tersusun dengan baik sangat penting dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Sehingga peran dan tugas dapat diketahui dengan jelas oleh suatu kelompok organisasi. Selanjutnya Dalam mengimplementasikan kebijakan BPBD Sidoarjo Menjalankan Peran dan fungsinya dengan berdasarkan pada peraturan Daerah (PERDA) Sidoarjo No.12 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Tanggap Darurat yang terdiri dari; Pengkajian secara cepat serta tepat, Menentukan status darurat bencana, Penyelamatan dan evaluasi, Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan, Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Kemudian dibuatnya SOP penanggulangan bencana juga membantu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana agar bisa berjalan sesuai tujuan.

Dari penuturan di atas pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam memberdayakan masyarakat yang terdampak bencana dari upaya tanggap darurat bencana yang dilakukan. Masyarakat juga tetap ikut andil dan berpartisipasi akan pencegahan bencana yang terjadi. Masyarakat secara terus menerus karena mereka diberikan sosialisasi pemahaman dan ilmu seperti SOP bagaimana menghadapi kondisi saat banjir, pengajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kejadian, pertolongan utama yang dibutuhkan serta mencari solusi yang cepat dan tepat untuk menolong korban bencana. Hal ini sudah disiapkan dan disosialisasikan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo mengenai SOP pengenalan akan penyebab hingga upaya tanggap darurat ketika bencana terjadi. Rincian SOP Tanggap Darurat untuk masyarakat ini tertuang dalam lampiran 3.

b) Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan interaksi yang terjalin antara seseorang dengan seseorang, beberapa orang atau kelompok. Dari pernyataan masyarakat dapat disimpulkan bahwa upaya tanggap darurat BPBD sudah menjalin komunikasi dan terjalin kerja sama dengan baik. tentunya kerja sama ini terjalin karena semua pihak terkait sadar dan mengetahui betul apa tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang dilakukan pihak terkait serta adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk terus waspada dan memberikan bekal ilmu pengetahuan agar bisa berantisipasi apabila seketika bencana terjadi tanpa harus menunggu petugas datang

c) Aspek Disposisi

Disposisi ialah karakteristik yang dimiliki implementor, seperti teguh pada prinsip, jujur, dan demokratis. Jika implementor memiliki karakter yang baik, dengan demikian kebijakan yang dibuat dapat berjalan sesuai tujuan ataupun sebaliknya yang sangat diperhatikan oleh pegawai BPBD untuk selalu menanamkan sikap tanggungjawab, teguh akan komitmen kerja, berempati akan korban bencana, dan demokratis dalam bertindak. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh BPBD ialah dengan dua sistem kerja, yakni sistem Top-Down (dari pihak Pemerintah Pusat ke BPBD) dan sistem Bottom-Up (Masyarakat ke BPBD). Kerjasama dan sinergi antar Instansi Pemerintah juga sangat membantu dalam penanggulangan bencana. Hal ini yang mampu menghasilkan tujuan bersama yang terlaksana dengan baik dan optimal. Evaluasi selalu

dibutuhkan sebagai gambaran agar suatu yang kurang baik bisa diperbaiki untuk bertindak selanjutnya agar mencapai keoptimalisasian dalam bekerja.

d) Aspek Sumber Daya

Terdapat dua jenis sumber daya yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia di mana hal tersebut sangat penting sebagai sarana dan pra sarana dalam menunjang keberhasilan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam organisasi. Dari temuan peneliti, Kompetensi pegawai fungsional tanggap darurat bencana banjir sudah cukup memenuhi kompetensi pegawai profesional. Dari tindakan yang diambil dan dikaji secara terus-menerus mengenai kondisi bencana hingga mengkoordinasikan kondisi masyarakat bencana dengan baik kepada pihak BPBD.

2. Hambatan pada Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Tahap Tanggap Darurat BPBD di Desa Banjarasri

Terbukti dari data yang didapat maka hambatan untuk mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana tahap tanggap darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo kepada Desa Banjarasri ialah adanya keterbatasan dan kurangnya pada anggaran penanggulangan bencana sehingga tidak bisa memprediksi dampak dari bencana terjadi, selanjutnya adanya kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan kebersihan dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya bersiaga dan tanggap jika bencana terjadi.

Penutup

Kesimpulan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berdasakan pada Perda Kabupaten Sidoarjo No.13 Tahun 2013 pada tahap tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo dalam mengimplementasikan kebijakan sudah dirasa baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesiapsiagaan, ketanggapan dan kecepatan mereka dalam melaksanakan tuntutan kondisi dilapangan. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara pihak terkait lebih memudahkan stake holder yang terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diberikan dapat dikatakan sudah baik oleh masyarakat sebagai penerima jasa layanan penanggulangan bencana khususnya banjir. Namun, adanya beberapa masalah seperti kurangnya tenaga di bidang tanggap darurat, anggaran yang terbatasserta fasilitas yang kurang memadai saat bencana terjadi yang membuat penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat beberapa aspek yakni :

1. Struktur Birokrasi, Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2022 Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD khususnya bidang rehabilitasi sudah berjalan baik. Akan tetapi bidang rehabilitasi tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya mereka menjalankan tugas sesuai ketentuan.
2. Komunikasi, Komunikasi antara BPBD dengan pemerintah desa, masyarakat dan pihak terkait lainnya berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tetap partisipan terhadap bencana. Adanya sosialisasi yang sering dilakukan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal apa saja yang menjadi penyebab banjir. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah banjir, serta apa yang akan masyarakat lakukan ketika ada banjir.
3. Disposisi, Kerjasama dan sinergi antar Instansi Pemerintah juga sangat membantu dalam penanggulangan bencana hal ini adalah sebagai bukti bahwa karakteristik implementor bisa

dikatakan baik dengan adanya hubungan yang solid mampu menghasilkan tujuan bersama yang telah ditetapkan.

4. Sumber Daya, adanya sumberdaya yang cukup mampu mendorong terlaksananya penanggulangan bencana secara optimal untuk masyarakat yang terdampak akan tetapi dilihat dari prakteknya adanya keterbatasan sumber daya baik manusia maupun anggaran yang tersedia membuat pelaksanaan penanggulangan bencana menjadi tidak optimal karena tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat.

Saran

1. Perlu menambahkan sumberdaya fasilitas-fasilitas yang dirasa kurang memadai seperti alat-alat yang dibutuhkan ketika bencana (pompa air, alat untuk membersihkan selokan dan lain-lain)
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dibidang tanggap darurat sebaiknya membentuk suatu program seperti desa tangguh bencana (DESTANA) agar masyarakat dapat secara mandiri mengantisipasi terjadinya bencana tanpa harus menunggu kebijakan dari pemerintah.
3. Memberikan pembinaan atau pengarahan (sosialisasi) yang lebih mendalam kepada masyarakat yang kurang rispek atau kesadarannya masih kurang akan pentingnya berpartisipasi dalam menanggulangi bencana banjir sehingga adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan untuk mencegah bencana terjadi.

Daftar Pustaka

- Ariyanti, I. H. (2015). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Deskriptif tentang Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 23–32
- Edward III, George C. 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Djaali, P. D. (2020). metodologi penelitian kuantitatif. (B. S. Fatmawati, Penyunt.) Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Janosik, S. M. (2005). Metode Penelitian. *NASPA Journal*, 42(4), 1.
- Marfuah, M., Cempaka, S., Risdan Ardiansyah, A., Rahmawati, L., Yunia Rediana, M., & Koswara, R. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.184>
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52–61. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2235>
- Nurani, D. (2009). Analisis implementasi..., Dwi Nurani. *Fisip Ui*, 2009. *PERDA_kabupaten_Sidoarjo_Nomor_12.Tahun_2013_Tahun_2011_11e6c827c379d5f09aec313631393339.pdfpdf(1).pdf*.(n.d.).
- Permatasari, I. (2015). *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11), 259.
- Pramono, S., & Yusuf, M. (2015). Implementasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Studi Pengembangan Penanggulangan Bencana Desa Tangguh di Desa Boboh Kecamatan Menganti). *Jurnal Ilmu Administrasi*, XII(April), 137–150.
- Presiden RI. (2007). *UU Nomor 24*. 43.
- Pustaka, K., & Dasar, D. A. N. (2020). *Penelitian Terdahulu*

Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi).

Soetoto. 2013. Geologi Dasar. Penerbit Ombak. Yogyakarta.

SOTK BPBD.pdf. (n.d.).

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta.